

## LABUHANBATU UTARA TERIMA PENILAIAN WAJAR TANPA PENGECEUALIAN



*Sumber: analisisdaily.com*

### **Aek Kanopan, (Analisa).**

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Selasa (1/9). Kabupaten yang dipimpin Bupati H. Kharuddin Syah, SE ini berhasil meraih prestasi tertinggi dalam pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah pada APBD 2014.

Kepala Perwakilan BPK RI Erwin SH. menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Labuhanbatu Utara TA 2014, yang diterima oleh Bupati Labuhanbatu Utara H. Kharuddin Syah, SE. bersama Ketua DPRD Labuhanbatu Utara Drs. H. Ali Tambunan, disaksikan beberapa pimpinan SKPD.

Dalam sambutannya Kepala BPK Perwakilan Sumut, Erwin SH. mengatakan, pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2014 Pemkab Labuhanbatu Utara yang dilakukan sesuai kewajiban BPK berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran informasi APBD Labuhanbatu Utara tahun 2014. BPK menggunakan beberapa kriteria di antaranya standar akuntansi pemeriksaan yang diatur dalam PP No 71 Tahun 2010, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

seperti pengungkapan penyusunan APBD dan pola-pola penyusunannya. Kriteria selanjutnya terkait efektivitas pengendalian diatur dalam UU No 15 Tahun 2004.

“Inilah kriteria yang digunakan BPK sebagai standar penilaian. Untuk itu, terhadap pemeriksaan BPK bagi Pemkab Labuhanbatu Utara terdiri dari 3 buku yakni, pertama terhadap laporan keuangan yang memuat opini BPK, kedua laporan atas sistem pengendalian secara intern yang memuat kelemahan SKPD agar dapat diperbaiki, dan ketiga memuat temuan yang disertai rekomendasi,” ujar Erwin.

### **Syukur**

H. Kharuddin Syah, SE. usai menerima opini WTP mengucapkan syukur serta bangga, karena untuk pertama kalinya Pemkab Labuhanbatu Utara meraih opini WTP dari BPK RI.

“Sebelumnya kita hanya menerima opini WDP, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumut yang telah memberikan masukan dan bimbingan dalam upaya pengelolaan keuangan dan aset daerah,” kata Kharuddin Syah.

Pada kesempatan itu Bupati mengingatkan kepada seluruh SKPD untuk terus meningkatkan kinerja, dan meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan keuangan. “Ingat untuk 2014 kita dapat opini WTP, tetapi tidak ada yang bisa menjamin tahun-tahun berikutnya mendapat opini yang sama. Ditegaskan kepada seluruh Pimpinan SKPD untuk dapat mempertahankan opini WTP,” ujar H. Kharuddin Syah.

Ketua DPRD Labura Drs. H. Ali Tambunan, mengucapkan selamat kepada Pemkab. Labuhanbatu Utara yang berhasil meraih opini WTP. “Sebagai legislatif yang memiliki fungsi kontrol, *budgeting* dan legislasi kami akan segera menindaklanjuti apa yang telah diserahkan BPK tersebut,” katanya.

### **Sumber Berita:**

1. Harian Analisa, Labura Terima Penilaian WTP, Kamis, 3 September 2015
2. [www.analisadaily.com/sumut/news](http://www.analisadaily.com/sumut/news), Labura Terima Penilaian WTP, Rabu, 2 September 2015.
3. [www.medanbisnisdaily.com](http://www.medanbisnisdaily.com)., Keuangan Labura Peroleh WTP dari BPK, Kamis, 3 September 2015.

### **Catatan:**

- Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Penjelasan Pasal tersebut menegaskan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria yakni kesesuaian dengan

standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini BPK, yaitu:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya.
2. Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.
3. Tidak wajar (*adversed opinion*), adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
4. Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*). Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan.